

SOEHARTO: CONTROVERSY AND ELIGIBILITY AS A NATIONAL HERO

Soeharto: Kontroversi dan kelayakan sebagai Pahlawan Nasional

Yeni Agustin¹ Fahrudin²

Universitas PGRI Yogyakarta

^a yenniagustinn2108@gmail.com

^b Fahrudin@upy.ac.id

(*) Corresponding Author

fahrudin@upy.ac.id

How to Cite: Yeni Agustin. (2024). Soeharto: Controversy and eligibility as a National Hero. doi: 10.36526/js.v3i2.4709

Received:

Revised:

Accepted:

Keywords:

Soeharto,
Controversy,
National Hero

Abstract

This article discusses the controversy and feasibility regarding Soeharto's appointment as Indonesia's National Hero. Although Suharto is known for successfully advancing Indonesia's economy for 32 years, he was also involved in human rights violations, corruption, collusion and nepotism. The aim of writing this article is to examine the theoretical understanding of the issue of Soeharto's appointment as a national hero, the procedure for appointing a hero in Indonesia, as well as the public's views regarding the controversy and suitability of Soeharto to become a National Hero. Using qualitative research methods, this article explores the contributions and controversies surrounding Soeharto as well as the requirements for becoming a national hero. Various views from human rights activists and academics show the importance of moral integrity in honoring national heroes. Even though Suharto had significant contributions, his complex leadership legacy is best recognized as part of history without giving him the title of National Hero.

PENDAHULUAN

Munculnya berita tentang akan diangkatnya presiden kedua RI Soeharto menjadi pahlawan nasional menjadi isu yang kontroversial. Dalam kegiatan silaturahmi bersama keluarga Besar Presiden kedua RI ketua MPR -RI Bambang Soesatyo atau yang lebih ramah dikenal (Bamsot) memberikan usul bahwa Presiden kedua RI soeharto mendapatkan gelar sebagai Pahlawan Nasional, hal ini diliput dari laman berita Liputan 6 pada 28 september 2024. Berita tersebut mengakibatkan pro dan kontra dari pandangan masyarakat dan akademisi di Indonesia. Berbagai dukungan dan penolakan yang menentang terhadap argumen pengangkatan Soeharto. Apakah layak Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional?

Soeharto merupakan tokoh yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, melalui kecerdasannya ia mampu memimpin indonesia selama 32 tahun (Noventari, 2016). Soeharto merupakan putra dari seorang ayah bernama Kertosudiro, ia berasal dari Desa Kemusu, Argomulyo, Godean, Yogyakarta (Yogaswara, 2007). Seharto ialah presiden kedua dan beliau memiliki masa kepemimpinan paling lama. Berita diangkatnya tokoh Soeharto sebagai pahlawan nasional di indonesia menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Indonesia. Soeharto menjadi presiden kedua di Indonesia, ia memimpin pada masa orde baru. Pada masa kepemimpinannya soeharto memiliki visi pembangunan yang bagus, sehingga indonesia mampu memiliki peningkatan di bidang ekonomi dan pembangunan yang cukup signifikan (Zanyinu, 2017). Soeharto juga berperan dalam penumpasan PKI pada peristiwa G30S PKI 1965 (Noventari, 2016).

Dalam melakukan kepemimpinan soeharto juga dikenal sebagai pribadi yang tegas sehingga bangsa lain segan terhadap bangsa indonesia pada masa itu. Soeharto mampu memegang kendali penuh selama lebih dari tiga dekade berkat dukungan dan peran strategis militer. Terciptanya militer sebagai mesin yang dianggap mampu untuk melindungi kebijakannya, lantas

soeharto mejadi panglima tertinggi di Militer (Hasan, 2011). Dalam menduduki jabatan sebagai presiden Soeharto melakuakn kebijakanntidak hanya dalam segi politik indonesia, namun ia juga mengubah dalam segi pembacaan sejarah dan warisan memori yang di berikan pada generasi sekanjutnya (Zanynu, 2019). Beliau wafat pada tanggal 27 Januari 2008. Dalam 3 dekade memimpin Soharto mendapatkan gelar bapak Pembangunan Indonesia.

Soeharto dalam peristiwa sekitar tahun 1965 ada skenario yang menyebutkan bahwa soeharto berada dibalik G30S PKI, soeharto dianggap bersimpati kepada PKI (Zanynu, 2019). Peristiwa G30S PKI, pemberontakan yang dilakukan oleh PKI yang memiliki tujuan mengganti ideooogi negara. Dalam pemerintahan soeharto indonesia mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi, tetapi banyak yang beranggapan bahwa selama kepemimpinan soeharto memiliki banyak pelanggaran KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan HAM, dalam praktek kepemimpinan soeharto menerapkan politik otokritik (Noventari, 2016).

Namun Soeharto juga memiliki kontribusi dalam pemerintahannya dari Soeharto dikenal memiliki visi pembangunan yang progresif pada masanya, ditandai dengan rendahnya angka pengangguran, stabilitas harga barang, keberhasilan swasembada pangan, kondisi politik yang stabil, serta terciptanya rasa aman di masyarakat. (Zanynu, 2017). Pada tahun 1965, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk, setara dengan negara-negara terbelakang di Afrika dan Asia pada masa itu. Namun, sejak Maret 1966, pemerintahan Orde Baru mulai berfokus pada upaya memulihkan perekonomian. Salah satu prioritas utama Soeharto adalah membangun Indonesia melalui sektor pertanian untuk mencapai swasembada pangan. Berkat kerja keras dan semangat yang konsisten, tujuan tersebut akhirnya berhasil dicapai, meskipun memerlukan waktu dan proses yang bertahap. (Fadilah, Siti Nur., 2017).

Berbagai Kontroversi dan kontribusi Soeharto sebagai pemimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade terus menjadi perdebatan yang rumit. Di satu sisi, para pendukungnya menilai Soeharto berhasil memajukan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur, stabilitas politik, dan program pertanian yang meningkatkan ketahanan pangan, terutama di masa Orde Baru. Namun, di sisi lain, kritik keras datang dari pihak yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia, korupsi besar-besaran, serta otoritarianisme yang meredam kebebasan politik dan berpendapat. Prestasi ekonominya dianggap tidak sebanding dengan beban sosial dan politik yang harus ditanggung bangsa. Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas warisan kepemimpinannya, yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Indonesia. Dalam artikel ini memiliki kebarua membahas tentang kontroversi dan kebaikan yang dilakukan oleh Soeharto, dan dikritisi ulang menurut penulis. Dalam artikel ini juga menyajikan syarat-syarat UUD terkait pengajuan pahlawan Nasional di Indonesia, serta menyajikan berita-berita terkait pro kontra dari berbagai pihak kalangan masyarakat dan akademisi.

METODE

Metodologi sejarah adalah pendekatan formal atau rangkaian dari tindakan dalam mengkaji sejarah (Ayoub et al., 2020). Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode kualitatif deskriptif analisis (Falah & Fauzi, 2021). Metode penelitian kualitatif ialah langkah dalam mengkaji untuk menciptakan data deskriptif berupa tulisan ataupun lisan (Nomaini et al., 2020). Dalam penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif kajian studi pustaka. Setelah pengumpulan data dari berbagai artikel dan buku penulis kemudian membuat kesimpulan. Dengan berbagai sumber yang didapatkan sehingga penulis menyusun artikel ini dengan sebaik-baiknya. pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji tentang pemahaman teoritis tentang isu diangkatnya soeharto sebagai pahlawan nasional, prosedur pengangkatan tokoh pahlawan di indonesia, serta pandangan masyarakat terkait kontroversi serta kelayakan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional. Melalui model kajian liteartur penulis melakukan penelitian melalui penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang dibahas pada artikel ini. Proses yang dilakukan dalam penulisan artikel ini dengan mengumpulkan kajian-kajian yang relevan dengan tema yang dibahas, membaca dengan seksama, kemudian penulis

melakukan seleksi terhadap kajian sebelumnya, menarik kesimpulan, dan menampilkan susunan kalimat yang mudah dipahami sehingga mudah dimengerti oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa kepemimpinannya Soeharto memiliki kontribusi di bidang ekonomi dan pembangunan, sehingga beliau mendapatkan julukan sebagai bapak pembangunan Indonesia. Pembangunan ekonomi masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, berperan signifikan dalam pengelolaan, stabilisasi, dan pengembangan aktivitas ekonomi di Indonesia (Trijayanti, 2008). Dalam pembangunan ekonomi ini Soeharto merumuskan kebijakan dengan sebutan Trilogi Pembangunan, yang awalnya dirumuskan dengan susunan: stabilitas-pertumbuhan-Pemerataan, kemudian susunan dimodifikasi menjadi: pertumbuhan-pemerataan-Stabilitas Nasional, lalu dalam memenuhi tantangan zaman dimodifikasi kembali: Pemerataan-pertumbuhan-Stabilitas Nasional (Makrum, 2015). Dalam pemerintahannya Soeharto membawa banyak perubahan, ia berhasil dalam membangun perekonomian Indonesia yang sempat merosot, mampu bangkit kembali dan memiliki tujuan yang jelas dan tegas (Endrayani, Tri Desy, 2021). Soeharto dengan kemauan politiknya yang kuat, stabilitas politik dan ekonomi, sumber daya manusia yang baik, dengan sistem perekonomian (Hilm, 2019).

Dalam bidang Militer Soeharto juga memiliki kontribusi yang cukup besar. Dengan masuknya tentara sekutu dan tentara Hindia Belanda (NICA) pada tanggal 29 September 1945 yang memiliki tujuan untuk menciptakan keamanan dan kedamaian, tetapi hal tersebut diketahui oleh tentara Indonesia sehingga terjadi berbagai pertempuran (Trijayanti, 2008). Sebagai bagian dari Batalyon 10/Divisi IX, Soeharto turut serta dalam serangan ke Magelang dan berhasil memaksa pasukan Sekutu mundur ke Ambarawa (Dwipayana, g., & Ramadhan, 1988). Soeharto memiliki peranan utama dalam penyusunan strategi Serangan Umum 1 Maret, Soeharto sebagai Komandan Weikrese III, Serta beliau juga mendapatkan dukungan dari rakyat (Hilm, 2019). Pada saat komandan Umar Slamet meninggalkan Kota Yogyakarta untuk mendatangi Madiun beberapa saat waktu. Soeharto mengambil keputusan untuk menyerang markas Jepang yang berada di kota baru (Suripto, 1972).

Dibalik keberhasilan dalam bidang ekonomi Soeharto pada masa Orde Baru di tahun 1998 terjadi sebagai puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintah masa Presiden Soeharto yang otoriter, Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang berkembang dan masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam mengelolanya (Irham, 2016). Pada masa Orde Baru, budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) berkembang pesat, terutama di kalangan elit pemerintahan. Praktik korupsi menjadi hal yang lazim dan berlangsung secara sistematis, mencerminkan lemahnya transparansi dan pengawasan dalam pemerintahan (Joniarta, 2018). Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak diawasi dapat menyebabkan tindakan yang merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir orang, sehingga memperbesar kesenjangan sosial. Dari pengalaman tersebut, kita belajar bahwa kejujuran dan tanggung jawab adalah dasar penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan mensejahterakan rakyat.

Pada masa kepemimpinan Soeharto juga terjadi tragedi pelanggaran HAM di masa kepemimpinannya yang memiliki dampak besar terhadap pencarian keadilan di Indonesia pendidikan (Fajar Nugroho et al., 2024). Selama masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto HAM sering diabaikan dan dilanggar oleh pemerintah, tetapi gerakan reformasi yang muncul pada awal 1990-an menuntut pengakuan HAM dan mendorong perubahan hingga akhirnya Soeharto turun dari kekuasaan pada tahun 1998 (Marhamah et al., 2023). Hal tersebut membuktikan kekuasaan yang otoriter dapat mengabaikan hak-hak dasar rakyat, menyebabkan penderitaan dan ketidakadilan yang dampaknya masih dirasakan hingga kini, serta menekankan pentingnya reformasi untuk memastikan perlindungan HAM di Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) suatu hak yang menyatu secara alami pada setiap individu sedari lahir (Fajar Nugroho et al., 2024). Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa kepemimpinan

Soeharto adanya pembantaian Massal 1965, latar belakangnya tuduhan pelaku dari pembunuhan tujuh perwira jenderal adalah PKI yang terjadi pada 30 september lebih terkenal dengan sebutan G30S PKI, Akibat dari hal tersebut menelan korban 1.500.000 jiwa (Kustiwa & Arief, 2021). Maka dalam pembantaian massal menyebabkan 1.500.000 orang menjadi korban akibat tuduhan keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam peristiwa G30S.

Pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya ialah, Penembakan misterius petrus 1982-1985 dengan banyaknya korban sekitaer 1.678 jiwa, kerusuhan Mei 1998 dengan 1.308 korban (Kustiwa & Arief, 2021). Kasus timor-timur pasca pemilihan umum 1999 dengan korban 97 jiwa, juga kasus pra DOM di Aceh pada tahun 1976-1989 dengan korban ribuan jiwa (Jayanti, 2018). Sementara masih ada juga kasus tanjung priok yang menelan korban 74 orang pada tahun 1984, kaus pada tahu 1966-2007 dengan ribuan korban di papua (Fajar Nugroho et al., 2024). Pada masa orde baru di tahun 1998 terjadi kkasus dukun santet di Banyuwangi yangmenelan korban puluhan orang (Alvonitasari, 2019). Kasus marsinah pada tahun 1995 (Merdeka, 2018). Pada tahun 1998, terjadi penembakan terhadap mahasiswa Trisakti yang mengakibatkan 31 korban jiwa. Peristiwa serupa terjadi pada tragedi Semanggi I di tahun yang sama, dengan jumlah korban mencapai 473 orang, dan Semanggi II pada tahun 1999 yang menyebabkan 231 korban jiwa. Selain itu, pada tahun 1998 juga terjadi kasus penculikan terhadap 23 aktivis. Kejadian-kejadian ini menjadi catatan kelam dalam sejarah pelanggaran HAM di Indonesia. (R Tambunan., Hari Reswanto., 2008). Kejadian-kejadian ini menunjukkan bagaimana hak asasi manusia, seperti hak atas hidup, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berekspresi, banyak dilanggar. Hingga saat ini, banyak keluarga korban masih menuntut keadilan dan transparansi atas pelanggaran HAM tersebut.

Dengan adanya kasus KKN dan berbagai pelanggaran HAM Masa soeahrto menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat dan akademisi "Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik" wacana itu sebagai upaya untuk menguntungkan kelompok tertentu. "Langkah itu sangat politis yang oportunistik. Hanya berbasis pada kepentingan segolongan kelompok orang saja," kata Usman dalam pesan tertulisnya kepada *Tempo*, Sabtu, 28 September 2024. Purwanta (Dosen Sejarah Universitas Sanata Dharma) mengungkapkan "Soeharto tidak pantas diberi gelar pahlawan nasional karena selama 32 tahun pemerintahannya, ia lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada positif. Pembangunan yang dilakukannya justru lebih banyak merugikan daripada memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. MAP Corner -Klub MKP UGM (Diskusi, Pahami, Aksi) pada hari Selasa, 8 November 2016. Sementara menurut Bamsoet mengungkapkan bahwa "Rasanya tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Soeharto dipertimbangkan oleh pemerintahan yang akan datang untuk mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional" di gedung Nusantara IV, Ruang Delegasi, Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 28 September 2024.

"Kriteria Calon Pahlawan Nasional

UU. No 20 Tahun 2009, tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 25 dan Pasal 26", untuk memperoleh Gelar:

A. Syarat Umum:

1. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI
2. Memiliki integritas moral dan keteladanan.
3. Berjasa terhadap bangsa dan Negara,
4. Berkelakuan Baik
5. Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan Negara: dan tidak pernah dipidana penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkal 5 (lima) tahun.

B. "Syarat Khusus:

1. Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan. melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya.
3. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara.
4. Pernah menghasikan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
5. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi dan/atau melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional"

Dari berbagai persyaratan diatas saya berpendapat bahwa untuk layak atau tidaknya menyandang gelar pahlawan nasional, pribadi tersebut tidak hanya berjasa secara fisik atau berperan dalam militer, tetapi juga memiliki moral yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan hak asasi manusia. Soeharto memang berjasa besar dalam beberapa aspek, tetapi memberatkan sebagian masyarakat untuk melupakan sengketa pada masa pemerintahannya. Pemberian gelar pahlawan kepadanya dapat memicu perdebatan publik yang sangat tajam Sehingga, menurut saya lebih baik untuk menghargai Soeharto sebagai bagian dari sejarah tanpa memberi gelar pahlawan nasional yang berpotensi menimbulkan kontra bagi masyarakat khususnya keluarga korban.

PENUTUP

Pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Indonesia menimbulkan banyak kontroversi. Meskipun ia diakui telah memajukan ekonomi negara selama 32 tahun, Soeharto juga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan nepotisme. Berbagai pandangan dari aktivis hak asasi manusia dan akademisi menunjukkan pentingnya integritas moral dalam memberikan gelar pahlawan. Oleh karena itu, meskipun Soeharto memiliki kontribusi yang signifikan, lebih baik jika ia diakui sebagai bagian dari sejarah tanpa diberikan gelar Pahlawan Nasional, agar tidak menimbulkan perdebatan dan perpecahan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvonitasari, R. (2019). *kesimpulan pelanggaran HAM Berst Pembunuhan Santet*. Koran Tempo.
- Ayoub, A., Potdar, V., Rudra, A., & Luong, H. (2020). Impact of Nepotism on the Human Resources Component of ERP Systems Implementation in Lebanon. *Communications in Computer and Information Science*, 1210 CCIS(1), 116–134. https://doi.org/10.1007/978-981-15-7530-3_9
- Dwipayana, g., & Ramadhan, K. H. (1988). *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan saya otobiografi*. Citra Lamtoro Gung Persada.
- Endrayani, Tri Desy, E. W. (2021). Peranan Jendral Soeharto Dalam Melahirkan Orde Baru 1965-1968. *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*, 2(1), 41–50.
- Fadilah, Siti Nur., S. B. W. J. (2017). Selok Pencitraan Soeharto dalam Buku Andai Pak Harto Nyapres , Kupilih ! (Kebosanan Orang-Orang Pinggiran Menanti Kemakmuran) dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis van Dijk. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(2), 139–151. <https://doi.org/10.15294/seloka.v6i2.17278>
- Fajar Nugroho, Bagus Gymnastiar, Moch Alfi Fahmi Azka, Affan Anshori Ma'ruf, & Didi Pramono. (2024). Tragedi Pelanggaran HAM di Masa Orde Baru: Pencarian Keadilan dan Keterbukaan. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(5), 01–10. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i5.289>
- Falah, M. F., & Fauzi, A. M. (2021). *Analisis Konflik Pilkada Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money Politik*. 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v6i3.1785>
- Hasan, K. (2011). *Propaganda Politik di Indonesia*. 1–5.

- Hilm, M. Z. (2019). Dominasi Soeharto, Monopoli Usaha Oleh Birokrat Dan Pengusaha. *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(5), 365–373. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jupe.v4i5.1272>
- Irham, M. A. (2016). Neo-KKN dan Tantangan Demokratisasi Indonesia. *Analisis*, XVI(1), 245–278.
- Jayanti, K. (2018). Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005. *Buletin Al-Turas*, 19(1), 49–70. <https://doi.org/10.15408/bat.v19i1.3698>
- Joniarta, I. W. (2018). Banalitas Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2(1), 149–156.
- Kustiwa, I., & Arief, S. A. (2021). Perbandingan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Antara Indonesia dan Afrika Selatan (Perspektif Lembaga Pelaksana dan Upaya Kedepan). *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.33387/dejure.v2i1.2732>
- Makrum. (2015). *Pak Harto Management Kepemimpinannya Dalam Pembangunan Nasional*. 1–15.
- Marhamah, I., Mardiyani, M., Liani, S. A., & Maulana, W. (2023). Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 243(4), 2986–6340. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7953998>
- Merdeka, R. (2018). Kasus Marsinah Kudu Dituntaskan. *Koran Rakyat Merdeka*.
- Nomaini, F., Agustina, S., & Malinda, F. (2020). Analisis Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pada Kantor Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(1), 7–15. <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i1.1023>
- Noventari, W. (2016). Kuasa Dibalik Senyum Sang Jendral (Analisis Gaya Kepemimpinan Dan Bagaimana Soeharto Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun). *Jurnal Ilmiah*, 24(2), 33–40.
- R Tambunan., Hari Reswanto., syaiful H. (2008). *Wacana HAM*. Buletin Wacana HAM.
- Suripto. (1972). *Soeharto, Suatu Sketsa karier dan politik*. GRIP.
- Trijayanti, A. (2008). *Peranan Soeharto Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Repelita I (1968-1973)*.
- Yogaswara, A. (2007). *Biografi daripada Soeharto : dari Kemusuk hingga “Kudeta Camdessus”* (p. 215). MedPress.
- Zanynu, M. A. (2017). Ragam Dan Orientasi Memori Atas Soeharto Dalam Berita Kompas.Com. *Communication*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.36080/comm.v8i1.648>
- Zanynu, M. A. (2019). Soeharto Dan Gerakan 30 September (G30S) Dalam Narasi Memori Media Berita Daring Indonesia. *Inter Komunika : Jurnal Komunikasi*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.33376/ik.v4i1.287>